

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan diharapkan untuk menerapkan prosedur akuntansi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satu prosedur yang digunakan oleh perusahaan adalah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Masalah kas merupakan suatu hal yang memerlukan penanganan khusus, terutama dalam administrasinya, baik untuk perusahaan besar, menengah maupun kecil. Sebab pada prinsipnya kas merupakan aktiva lancar yang mempunyai sifat paling *liquid* dan mudah dipindahtangankan (Yusuf,2001).

Kas dilihat dari sifatnya merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional perusahaan. Karena sifat kas yang *liquid*, maka kas mudah digelapkan sehingga diperlukan pengawasan terhadap kas dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, penggunaan dan pencatatan. Selain itu juga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap fungsi-fungsi pengeluaran kas.

Pengelolaan kas yang baik memerlukan prosedur-prosedur yang

memadai untuk melindungi pengeluaran kas. Dalam merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan tiga prinsip pokok. Pertama, harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggung jawab menangani transaksi kas dan menyimpan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas. Kedua, semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank secara harian. Ketiga, semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang kecil jumlahnya dimungkinkan untuk menggunakan uang tunai, yaitu melalui kas kecil.

Penggunaan kas yang tidak semestinya dilakukan pengeluaran juga diperlukan pengawasan yang ketat, agar dana yang digunakan tidak diselewengkan untuk penggunaan yang tidak sesuai. Maraknya tindak kecurangan penggunaan dana yang semakin hari semakin memprihatinkan bahkan hingga saat ini masih terus berkejang di pemerintahan Indonesia. Tidak hanya di jajaran pemerintahan saja namun di sebuah lembaga maupun sebuah yayasan juga bisa terdeteksi melakukan tindakan kecurangan walaupun kasusnya kecil tidak seperti di pemerintahan.

Dalam pemerintahan Indonesia saat ini, kecurangan penggunaan dana kas sudah menjadi hal yang sering terjadi. Hal ini dimungkinkan karena longgarnya pengawasan dari pihak yang lebih berwenang, atau dengan kata lain pendelegasian wewenang di dalam tubuh aparatur pemerintahan sudah sangat tidak efektif. *Fraud* dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam

maupun diluar lingkungan pemerintah. Namun pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan pemerintah, karena biasanya orang-orang tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di lingkungannya, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan sebuah kecurangan. *Internal control* bisa dikatakan sebagai kunci permasalahan dimana bisa terjadinya kecurangan, disamping orang tersebut mempunyai kesempatan dan mempunyai dorongan untuk melakukan kecurangan tersebut.

Laporan keuangan diterbitkan untuk memberikan informasi keuangan mengenai penggunaan dana, posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan yang akan membantu pihak ekstern dalam mengambil suatu keputusan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Akan tetapi, ada beberapa pihak pelaku yang terdeteksi melakukan *fraud* atau kecurangan dalam laporan keuangan dengan menampilkan gambaran kondisi keuangan yang terbaik sehingga dapat menarik keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Berkaitan dengan pelaporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai tindakan yang disengaja yang mengakibatkan salah saji material dalam pelaporan keuangan. (*Generally Accepted Auditing Standard – GAAS*, 2006). Salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan yang curang merupakan salah saji yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Sumber dari salah saji ini meliputi manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, salah saji atau penghilangan yang disengaja dalam

laporan keuangan, dan/atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi.

Kasus kecurangan penggunaan danadi Indonesia sendiri juga banyak terjadi dalam level perusahaan swasta maupun pemerintahan. Pada 27 Januari 2016, diumumkan skor Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) adalah 36 dan menempati urutan ke 88 dari 168 negara yang diukur tingkat korupsinya (*Transparency International*, 2016). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan isu korupsi maupun *fraud* seperti likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN maupun swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, dan lain-lain.

Pada tahun 2009, terjadi skandal kecurangan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk. Berbagai istilah digunakan untuk *fraud* ini, seperti manipulasi laporan keuangan, *overstate*, penggelembungan, *markup*, kelebihan pencatatan laba, dan seterusnya. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan dua direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur Utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar Rp5 miliar. Nilai Rp5 miliar tersebut terdiri dari dua proyek

yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar Rp13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja.

Permasalahan penerimaan hingga pengeluaran dana beasiswa YBM (Yayasan Baitul Maal) BRI pun terkadang penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Terutama dalam pengeluaran dana beasiswa tersebut dituntut hanya digunakan sebagai biaya sekolah saja. Kecurangan dalam penggunaan dana dapat membuat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi sulit untuk dilakukan sesuai mekanismenya. Selain itu, tertib administrasi penggunaan dana beasiswa YBM BRI juga menjadi kendala tersendiri. Seperti kwitansi pembayaran biaya sekolah dan daftar biaya lainnya seringkali tidak lengkap.

Pondok Pesantren Bina Insani merupakan salah satu Yayasan yang memperoleh beasiswa YBM BRI dari Jakarta. Dengan adanya dana beasiswa tersebut selama tahun 2015-2016. Dimana setiap penggunaan dana beasiswa tersebut harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan dana dari sebuah institusi tersebut, pengelolaan keuangan baik yang menyangkut prosedur, penggunaan dana, dan pencatatan keuangan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan

peraturan. Dengan latar belakang tersebut penulis mengambil judul penulisan skripsi dengan judul: **“EVALUASI PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA DANA BEASISWA YBM-BRI DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PENGGUNAAN DAN PENCATATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DI PONDOK PESANTREN BINA INSANI SELAMA TAHUN 2015-2016”**. Sehingga diharapkan penulis dapat memberikan evaluasi atas penggunaan dana beasiswa YBM BRI di Pondok Pesantren Insani pada tahun berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya maka rumusan masalah adalah untuk mengevaluasi prosedur penerimaan dan pengeluaran pada dana beasiswa YBM-BRI dalam mendeteksi kecurangan penggunaan dana dan pencatatan laporan pertanggung jawaban di Ponpes Bina Insani selama tahun 2015-2016.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis melakukan batasan-batasan. Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas pada dana beasiswa YBM BRI untuk mendeteksi kecurangan penggunaan dan pencatatan laporan pertanggung jawaban di Pondok Pesantren Bina Insani selama tahun 2015-2016.
- b. Input data yang diperoleh dari penerimaan dan pengeluaran atas

penggunaan dana beasiswa YBM BRI selama tahun 2015-2016.

- c. Pada penelitian ini tidak menggunakan *flowchart* untuk prosedur penerimaan dan pengeluaran atas dana YBM-BRI.
- d. Tidak mengarah ke ranah hukum.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan :
Untuk mengevaluasi prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dana YBM-BRI dalam mendeteksi kecurangan penggunaan dan pencatatan laporan pertanggung jawaban di Pondok Pesantren Bina Insani selama tahun 2015-2016..

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan pertimbangan dari pihak-pihak yang mengadakan penelitian tentang evaluasi prosedur penerimaan dan pengeluaran dana dalam melakukan pendeteksian kecurangan (*fraud*) dalam penggunaan dana beasiswa YBM BRI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan penulis tentang prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada dana YBM-BRI dan bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis yang telah diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Pondok Pesantren BINA INSANI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai peringatan (*warning*) agar manajemen tidak melakukan tindak kecurangan (*fraud*) dalam penyajian laporan pertanggungjawabannya.

c. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan referensi maupun masukan untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Adanya penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru khususnya bagi mahasiswa akuntansi.

e. Bagi Akuntan Publik

Dengan adanya penelitian ini membuat kinerja para akuntan publik ataupun auditor akan sadar bahwa kinerja mereka yang dengan kesungguhan akan membawa dampak yang signifikan bagi kasus *fraud* di Indonesia, sehingga kedepannya mampu

bekerja lebih independen dan semakin fokus.